GERAI INFO
BANK INDONESIA
EDISI 40 ■ JULI 2013 ■ TAHUN 4 ■ NEWSLETTER BANK INDONESIA

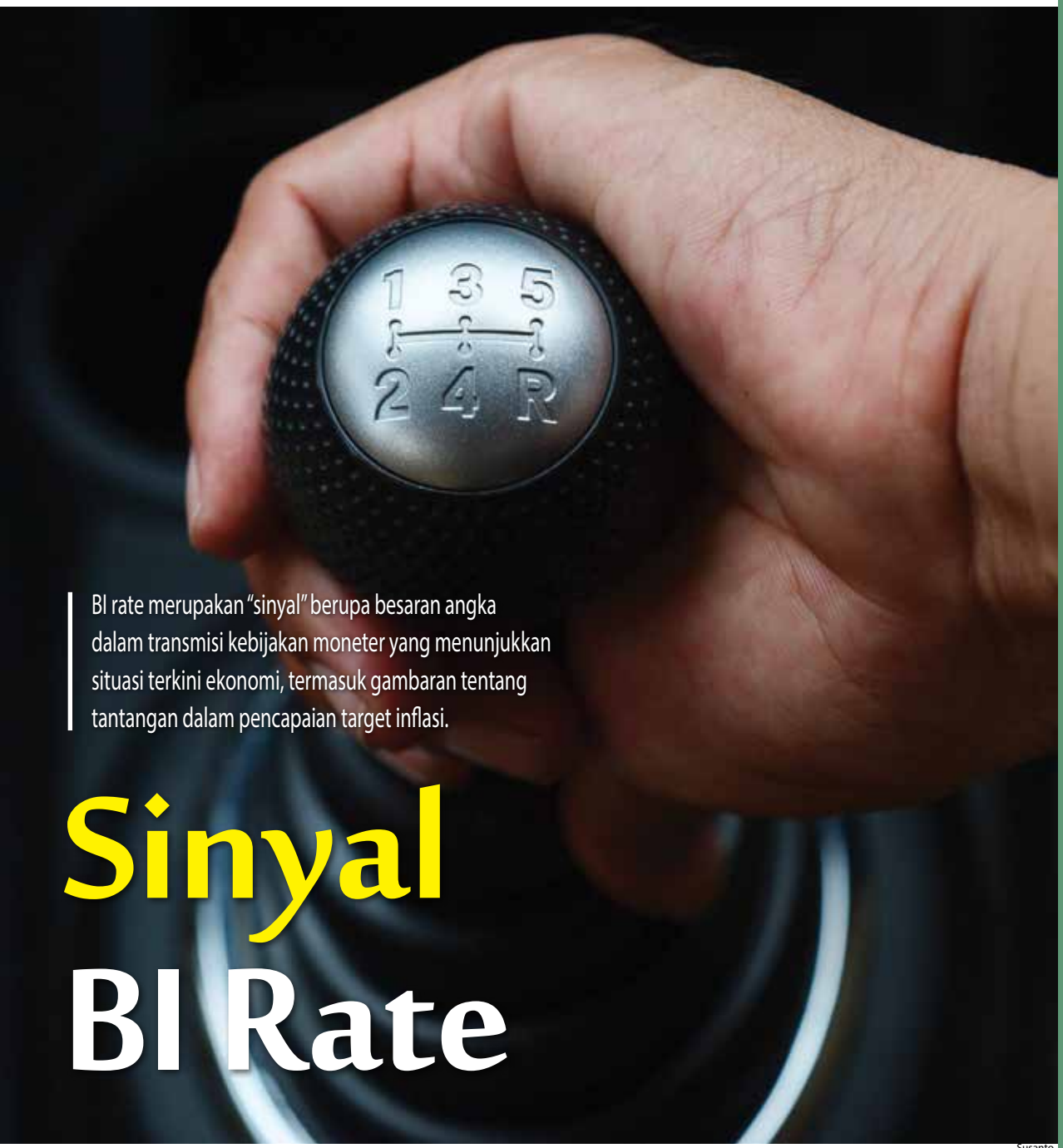

BI rate merupakan "sinyal" berupa besaran angka dalam transmisi kebijakan moneter yang menunjukkan situasi terkini ekonomi, termasuk gambaran tentang tantangan dalam pencapaian target inflasi.

Sinyal BI Rate

Susanto

Dari segenap perangkat yang dimiliki Bank Indonesia, BI rate merupakan salah satu yang kerap disebut dan muncul dalam pemberitaan. Namun, bukan berarti "barang" ini dipahami dan dikenali betul fungsi dan kehadirannya.

Suku bunga acuan ini pada satu sisi merupakan tanggapan atas sebuah situasi ekonomi ibarat obat bagi sebuah penyakit, di sisi lain juga serupa aba-aba yang menjadi pertanda akan seperti apa "biduk" perekonomian berlayar membelah lautan perekonomian global.

Bagaimanapun juga, sinyal yang tepat dibaca pasar, akan turut menentukan ke mana dan secepat apa laju ekonomi Indonesia bergerak. Termasuk apakah target sasaran inflasi yang menjadi visi Bank Indonesia di usia yang sudah mencapai 60 tahun ini bakal tercapai. Tentu saja, suku bunga tetap hanya salah satu perangkat yang tersedia. Karena sejatinya, ekonomi bangsa tak semata ditentukan oleh sebuah angka. Sinergi seluruh anak bangsa dan bauran beragam kebijakan, adalah tantangannya. ◆

4
"Membaca" BI Rate

5
Sinyal kepada Pasar

7
Seni Kebijakan Moneter

8
60 Tahun Bank Indonesia

12
BI Rate vs DF Rate

editorial

Bukan Sinyal Tunggal

Bukan kejadian pertama, barangkali, bila ada yang bertanya apa beda suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dengan suku bunga yang lebih akrab dikenal masyarakat seperti suku bunga deposito, tabungan, atau malah kredit. Mungkin juga bukan kejadian pertama, BI rate dipahami sebagai besaran acuan bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia bagi perbankan untuk menentukan bunga-bunga deposito, tabungan, atau kredit itu.

Kalaupun berhadapan dengan kalangan yang lebih memahami apa itu suku bunga acuan, mungkin orang yang benar-benar memahami cara membaca besaran angka BI rate itu sebagai representasi situasi dan tantangan perekonomian Indonesia pun tak mencakup seluruh orang yang tahu beda BI rate dengan suku bunga produk perbankan. Maka, logis pula bila tak semua orang memahami apa makna dan situasi yang terjadi, ketika Bank Indonesia memutuskan menaikkan atau menurunkan BI rate.

Setali tiga uang, bisa jadi tak semua orang tahu cara membaca kebijakan moneter beragam negara dalam wujud besaran suku bunga masing-masing bank sentralnya. Apalagi, tidak setiap peristiwa ekonomi mengundang respons yang sama dari setiap negara. Adalah niscaya, bahkan, atas nama kepentingan bangsa dan negara masing-masing, respons yang muncul justru bertolak belakang, dengan aneka konsekuensi baik bagi negara itu sendiri, negara kawasan, maupun global.

Karenanya, menjadi penting untuk kembali menengok salah satu pengertian mendasar dari sebuah tonggak kebijakan moneter, yang kita sebut kini sebagai suku bunga acuan. Apalagi, dalam rentang perjalanan 60 tahun Bank Indonesia berkiprah menjaga biduk perekonomian dari hempasan ekonomi dan fluktuasi nilai tukar, ada banyak tantangan dan pelajaran yang dihadapi dan dipetik untuk menuju visi yang sudah ditetapkan.

Pada akhirnya, suku bunga acuan tetaplah hanya satu dari sekian piranti yang diperlukan dan dipakai untuk menjaga laju perekonomian. Di luar itu, ada banyak faktor dan alat yang punya andil, baik sebagai "aksi" maupun "reaksi" ekonomi. Bauran yang tepat dan efektif, termasuk BI rate di dalamnya, menjadi tantangan yang menghadang untuk menjadi jawaban bagi cita-cita perekonomian sebuah negara: kesejahteraan bangsa. ◆

kolom

D Aulia

DIFI A JOHANSYAH
Departemen Komunikasi

Penjaga Keseimbangan

"Apa *sih* BI rate?" tanya seorang wartawan yang baru bertugas di *desk* ekonomi. "Apa itu artinya suku bunga untuk masyarakat yang *nyimpan* di Bank Indonesia?" lanjutnya.

Pertanyaan yang wajar *sih*. Jangankan dia yang wartawan baru, banyak orang juga bingung dengan BI rate. Gunanya apa? Cara *ngitungnya gimana*?

Emang BI rate sulit dipahami masyarakat umum kalau pakai teori. Harus pakai perumpamaan.

Saya terangkan BI rate dengan dua contoh.

Satu, BI rate itu ibarat mekanisme perpindahan gigi persneling mobil yang harus diambil sesuai kondisi yang dihadapi. Kalau gigi persneling naik, artinya jalan ke depan mulus. Kalau gigi turun, artinya harus hati-hati menghadapi jalan yang tidak rata atau tikungan.

Dengan analogi persneling, BI rate punya prinsip serupa. Namun, kehati-hatian justru diisyaratkan ketika BI rate naik, misalnya saat inflasi mulai naik. Laju ekonomi saat itu dinilai terlalu cepat, bisa mengakibatkan ketidakseimbangan. Sebaliknya, BI rate akan turun saat inflasi bukan lagi bahaya dan ekonomi dapat melaju lebih kencang.

Contoh ***kedua***, BI rate itu adalah biangnya suku bunga. Semua suku bunga yang ada, dari deposito, sampai *yield* obligasi, akan mengacu kepada BI rate dengan penyesuaian terhadap jangka waktunya.

Jadi, BI rate adalah indikator keseimbangan. Mirip keseimbangan yang mengatur gigi persneling mobil dalam berbagai kondisi jalan.

Karena itu, BI rate hanya berubah kalau keseimbangan itu terganggu secara fundamental dan dampaknya jangka panjang. BI rate bukan untuk perubahan jangka pendek agar ekonomi tidak seperti *rollercoaster* yang naik turunnya tiba-tiba.

Selain penjaga keseimbangan, BI rate juga pemberi kepastian kepada pelaku usaha akan medan ekonomi ke depan. Karena sebagai nahkoda moneter, Bank Indonesia harus memberikan kepastian kepada penumpang akan kepastian jalan yang ditempuh ke depan. ◆

redaksi

BANK INDONESIA

Penanggung Jawab
DIFI A JOHANSYAH

Pemimpin Redaksi
PETER JACOBS

Redaksi Pelaksana
RIZANA NOOR
DWI MUKTI WIBOWO
ERNAWATI JATININGRUM
WAHYU INDRA SUKMA
SURYA NANGGALA
DAHLIA DESSIANAYANTHI

Alamat Redaksi
Humas Bank Indonesia
Jl MH Thamrin 2 - Jakarta
Telp : 021 - 29817317, 29817187
email : humasbi@bi.go.id
website : www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

Perubahan BI rate merupakan bagian dari bauran kebijakan untuk merespons secara *pre-emptive* peningkatan ekspektasi inflasi.

"Membaca" BI Rate

Susanto

Konon, jika Alan Greenspan tersenyum, indeks saham bakal naik. Jika dia terlihat serius, esoknya pasar modal anjlok. Pameo tentang salah satu gubernur Federal Reserve yang ikonik ini adalah penyederhanaan tanggapan pasar terhadap kebijakan bank sentral. Sekaligus, pameo tersebut menggambarkan pandangan bank sentral yang dianggap sangat menentukan situasi ekonomi negara.

Di Indonesia, pasar mendapat kejutan ketika pada 13 Juni 2013 Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen. Kenaikan ini mengakhiri periode 16 bulan suku bunga acuan itu bertengger di level 5,75 persen sejak Februari 2012.

Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia yang menaikkan suku bunga acuan pada 2013. Kebijakan ini, merupakan bagian dari bauran kebijakan untuk merespons secara *pre-emptive* peningkatan ekspektasi inflasi, sekaligus memelihara kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan. "Kenaikan BI Rate akan mendongkrak kepercayaan pasar," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Sebelumnya, banyak analis meyakini BI rate tak bakal dinaikkan sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Maka beragam reaksi muncul saat BI rate naik mendahului kenaikan harga bahan bakar minyak itu.

Sebagian analis membaca kenaikan BI rate ini merupakan penyesuaian atas naiknya suku bunga Deposit Facility (DF) rate sebesar 25 persen menjadi 4,25 persen, dua hari sebelumnya. DF rate, suku bunga yang dibayarkan Bank Indonesia pada bank yang mendepositokan uangnya di Bank Indonesia, memang berpengaruh langsung pada suku bunga pinjaman antarbank.

> Perubahan BI rate lebih besar daripada 25 basis poin, terakhir kali terjadi sebelumnya pada 2009, yaitu saat diturunkan dari 9,25 persen menjadi 8,75 persen.

Analis lain berpendapat kenaikan BI rate kali ini adalah respons untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Di antara analis tersebut ada juga yang berpendapat Bank Indonesia akan kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin pada bulan berikutnya, untuk mengerem laju kredit properti.

Maka, ketika kemudian Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 6,5 persen pada 11 Juli 2013, pasar kembali mendapat kejutan. Meski sebagian besar analis telah memperkirakan langkah tersebut, tetapi besaran kenaikannya melampaui perkiraan mereka.

Menurut para analis, Bank Indonesia kali ini keluar dari "konsensus" kebiasaan perubahan BI rate sebesar 25 basis poin pada setiap kali. Perubahan BI rate lebih besar daripada 25 basis poin, terakhir kali terjadi sebelumnya pada 2009, yaitu saat diturunkan dari 9,25 persen menjadi 8,75 persen.

Dengan kenaikan BI rate yang kedua dalam dua bulan berturut-turut ini, para analis akhirnya memahami bahwa Bank Indonesia memang mendasarkan kebijakannya pada upaya menekan laju inflasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Meskipun, tak bisa dipungkiri kebijakan BI rate juga berdampak pada nilai tukar dan laju pertumbuhan kredit, sebagai satu rangkaian proses transmisi kebijakan moneter.

Bank Indonesia pun menegaskan langkahnya yang tak selalu harus seirama dengan negara-negara di kawasan Asia. Dalam situasi kelesuan ekonomi global dan ancaman pelemahan ekonomi Cina, Bank Sentral Korea Selatan dan Jepang, misalnya, lebih memilih menurunkan prospek inflasi. Sementara Bank Sentral Malaysia selama 13 bulan mempertahankan suku bunga acuan mereka. Demikan pula Bank of Thailand yang tak mengubah suku bunga rendah yang mereka patok sejak Mei 2013.

Pilihan strategi Bank Indonesia pada Juni dan Juli 2013, adalah "untuk memastikan inflasi yang meningkat pascakenaikan harga BBM bersubsidi dapat segera kembali ke dalam lintasan sasarannya". Harapannya, sinyal kebijakan ini terbaca oleh pasar, sejelas senyum maupun sikap serius Alan Greenspan di Amerika. ◆

Sinyal kepada Pasar

Pesan yang jelas merupakan faktor krusial dalam setiap pengambilan kebijakan moneter oleh bank sentral.

Pada tahun 67 sebelum Masehi, penduduk Roma gelisah karena harga gandum melonjak. Pasokan bahan pangan ke ibu kota Kekaisaran Romawi itu terganggu maraknya aksi perompakan di laut.

Demi menenangkan hati rakyat, Kaisar Marcus Tullius Cicero menunjuk Gnaeus Pompeius sebagai komandan misi angkatan laut Romawi untuk menumpas para bajak laut. Di hari pengumuman penunjukan itu, harga gandum di Roma langsung turun.

Pompeius akhirnya memang berhasil mengusir bajak laut dari kawasan Mediterania hanya dalam 40 hari. Namun, Cicero mengajarkan pada kita bahwa pesan yang kuat bisa memberi pengaruh sangat besar, bahkan sebelum kebijakan itu dilaksanakan berupa tindakan nyata.

Pelajaran dari Cicero berlaku tak hanya pada masa lalu maupun di bidang politik saja. Kebijakan moneter bank sentral pada hari-hari ini, bukan perkecualian. Pesan yang jelas, juga merupakan faktor krusial dalam setiap pengambilan kebijakan moneter oleh bank sentral.

"Sinyal" BI Rate

Dalam rezim *inflation targeting framework* (ITF) yang dianut penuh mulai Juli 2005, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) berdasarkan sasaran tingkat inflasi yang dituju, sebagai panduan bagi pasar. BI rate merupakan *policy rate*, sebagai suku bunga acuan (*benchmark*).

Dampak BI rate terasa dalam implementasi operasi moneter yang dilakukan BI melalui pengelolaan likuiditas di pasar. Alatnya adalah suku bunga bunga pasar uang antarbank *overnight* (PUAB O/N).

Bagi perbankan, PUAB merupakan salah satu alternatif cara pemenuhan kebutuhan likuiditas harian. Melalui transaksi pinjaman antarbank yang sebagian besar berjangka pendek inilah, sinyal kebijakan moneter ditransmisikan kepada suku bunga instrumen lain di pasar keuangan, seperti suku bunga deposito dan kredit.

Di lain pihak, kenaikan suku bunga acuan juga bisa dipakai untuk menarik masuk dana asing, yang sekaligus bisa menambah likuidi-

Susanto

Susanto

tas valuta asing di dalam negeri. Bila berjalan, ujungnya adalah kestabilan nilai tukar.

ITF punya tiga karakteristik. ***Pertama***, kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian target inflasi yang diumumkan ke publik. ***Kedua***, kebijakan moneter diimplementasikan sebagai kebijakan antisipatif (*pre-emptive* atau *forward looking*), merespons perkembangan arah inflasi ke depan. ***Ketiga***, kebijakan moneter diterapkan secara transparan dan akuntabel.

Maka, penargetan inflasi tak lagi sekadar kerangka kerja kebijakan moneter, tetapi juga sebagai langkah meningkatkan *good governance* bank sentral. Dengan mengumumkan target inflasi jangka menengah ke publik, Bank Indonesia dituntut berkomitmen mencapai target kestabilan harga dan nilai tukar rupiah sebagai tujuan akhir atau jangka panjang dari kebijakan moneter. Inflasi yang rendah dan stabil, menjadi cerminnya.

Dalam tataran operasional, BI rate dipakai sebagai instrumen *policy rate* untuk merespons tren inflasi di masa depan. Perubahan BI rate dilakukan jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya (*inflation gap*) dipandang cukup signifikan.

Perubahan BI rate juga dipakai untuk merespons timbulnya *output gap*, kesenjangan antara permintaan dan penawaran dalam ekonomi domestik. Dalam kasus Juni dan Juli 2013, perubahan BI rate merupakan respons atas proyeksi inflasi yang bakal meninggi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, sekaligus pengerem kenaikan harga aset di sektor properti.

Transmisi Lima Jalur

Walau bekerja dalam kerangka ITF, kebijakan BI rate tak hanya mempengaruhi ekonomi melalui ekspektasi inflasi publik, tetapi juga lewat nilai tukar rupiah, suku bunga perbankan, penyaluran kredit, serta harga aset seperti properti dan saham di pasar modal.

> Perubahan BI rate dilakukan jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya (*inflation gap*) dipandang cukup signifikan.

Pada akhirnya, dampak langsung BI rate memang suku bunga kredit dan deposito perbankan.

Apabila perekonomian sedang lesu, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan BI rate. Sasarannya, langkah tersebut berdampak menurunkan suku bunga kredit perbankan, sehingga permintaan kredit dari dunia usaha dan rumah tangga akan meningkat. Hasilnya, aktivitas konsumsi dan investasi meningkat sehingga perekonomian makin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan ekonomi menggelegak dan inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat merespons dengan menaikkan BI rate untuk mengerem laju perekonomian yang terlalu cepat.

Perubahan BI rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan BI rate akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan luar negeri, sehingga memancing ketertarikan investor asing untuk masuk ke instrumen keuangan di Indonesia seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI). Aliran modal asing ini bisa mendorong apresiasi nilai tukar rupiah.

Perubahan BI rate juga bisa mempengaruhi perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti properti, saham, dan obligasi. Ketika kekayaan individu dan perusahaan "berkurang" karena penurunan harga tersebut, kemampuan mereka melakukan kegiatan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi juga akan menurun, sehingga laju perekonomian yang terlalu cepat bisa ditahan.

Ekspektasi publik terhadap inflasi, pada akhirnya juga terdampak oleh perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi. Penurunan suku bunga mendorong aktivitas ekonomi, sehingga menaikkan permintaan barang dan jasa yang diikuti kenaikan harga. Inflasi akan mendorong kalangan pekerja meminta upah lebih tinggi, yang pada akhirnya dibebankan produsen ke konsumen melalui kenaikan harga. Di tengah naik-turunnya harga inilah, Bank Indonesia "memainkan peran" melalui kebijakan moneter.

Lewat lima jalur tersebut, kebijakan BI rate ditransmisikan ke roda perekonomian. Strategi seperti ini merupakan instrumen yang baik untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan menurunkan inflasi hingga mencapai kisaran 4-5 persen. Harapannya, sinyal yang dipancarkan Bank Indonesia melalui kebijakan BI rate, ditangkap jelas oleh semua kalangan, dan sasaran inflasi dapat terwujud. ◆

Sebelum ITF

Inflation targeting framework (ITF) baru dianut penuh oleh Bank Indonesia pada Juli 2005. Sebelumnya, kebijakan moneter Bank Indonesia berpatokan pada prinsip *monetary targeting* atau *base money targeting*.

Dalam prinsip *monetary targeting*, jumlah uang beredar (M1 dan M2) ditetapkan untuk melindungi negara dari ancaman hiperinflasi. Ketika itu, BI rate langsung dijadikan patokan penentuan suku bunga deposito perbankan.

Namun, Bank Indonesia kemudian menyadari sinyal arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang berpatokan pada *base money* tak terlalu kuat ditangkap oleh pasar. Akibatnya, target nilai tukar rupiah yang kerap tak tercapai.

Maka, ITF pun dipilih. BI rate ditetapkan berdasarkan sasaran tingkat inflasi yang dituju sebagai panduan bagi pasar. ◆

Langkah Setelah BI Rate

Masih banyak faktor-faktor dari sisi penawaran yang berpengaruh terhadap upaya pengendalian inflasi.

Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) 5,75 persen yang berlaku sejak ditetapkan pada Februari 2012, akhirnya menggeliat pada 13 Juni 2013. Pada hari itu, mata dunia terarah ke Indonesia, yang menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen.

Otoritas Bank Sentral Indonesia dinilai telah menempuh langkah agresif dan bersikap *pre-emptive*, sebagai respons peningkatan ekspektasi inflasi, yang dalam konteks saat itu adalah rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Apresiasi atas langkah ini antara lain datang dari Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research. Dalam pernyataannya, lembaga tersebut menulis, "*The pre-emptive rate hikes demonstrate a commitment to get ahead of the curve*".

Lalu, harga bahan bakar minyak bersubsidi pun naik, mulai 22 Juni 2013. Harga Premium naik Rp 2.000 per liter menjadi Rp 6.500 per liter, sementara harga solar naik Rp 1.000 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.

Menyusul kenaikan harga ini, inflasi melonjak cukup tinggi. Inflasi bulanan Juni 2013 tercatat 1,03 persen dan inflasi tahunan mencapai 5,9 persen. Meski demikian, Bank Indonesia mencatat inflasi inti masih terkendali di level 3,98 persen.

Namun, kenaikan inflasi karena naiknya harga bahan bakar minyak tersebut sudah diprakirakan Bank Indonesia. Termasuk dampak dorongannya terhadap harga barang yang ditetapkan pemerintah dan bahan makanan. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi terhadap inflasi diprakirakan sebesar 2,5 persen, sehingga inflasi akhir tahun akan mencapai 7,8 persen.

Menyikapi perkembangan itu, Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate pada 11 Juli 2013. Kali ini sebesar 50 basis poin, menjadi 6,5 persen. Kebijakan menaikkan BI rate dalam dua bulan berturut-turut ini diambil untuk memastikan inflasi segera kembali ke lintasan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Susanto

> Kebijakan menaikkan BI rate dalam dua bulan berturut-turut ini diambil untuk memastikan inflasi segera kembali ke lintasan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

MUSLIMIN ANWAR
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Bank Indonesia memprakirakan dampak kenaikan harga BBM bersifat temporer sekitar tiga bulan, dengan puncaknya pada Juli 2013. Dampak tersebut diprakirakan bakal mulai menurun pada Agustus 2013 dan kembali ke pola normal pada September 2013.

Dengan kebijakan tersebut di atas ditambah dukungan bauran kebijakan moneter lainnya, inflasi indeks harga konsumen (IHK) diprakirakan turun dari 7,8 persen menjadi 7,65 persen pada akhir 2013.

Namun, untuk mencapai inflasi sesuai asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 7,2 persen, perlu ada upaya ekstra dan langkah lanjutan dari pemerintah. Terutama untuk mengendalikan inflasi pangan dan tarif angkutan.

Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia mengindikasikan inflasi bulanan pada Juli 2013 terutama dipicu oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan. Sementara berdasarkan identifikasi Bank Indonesia di 20 kota, atau sekitar 78 persen dari total sampel dalam keranjang indeks harga konsumen (IHK), rata-rata tarif angkutan dalam kota dan angkutan antar-kota dalam provinsi naik 30 persen.

Pada dasarnya, upaya pengendalian inflasi memang tidak dapat dilakukan semata-mata oleh Bank Indonesia, yang bertugas mengendalikan inflasi dari sisi permintaan. Masih banyak faktor-faktor dari sisi penawaran yang berpengaruh terhadap upaya pengendalian inflasi.

Meski demikian, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia. ***Pertama***, memperkuat peran tim pengendali inflasi dan tim pengendali inflasi daerah, untuk meminimalkan gangguan dari sisi pasokan. Sasarannya, meminimalkan tekanan tambahan terhadap kenaikan harga barang.

Kedua, percepatan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional sebagai referensi harga yang kredibel bagi pengambil keputusan dan masyarakat luas. ***Ketiga***, perlunya penguatan kerja sama antardaerah melalui pemetaan kondisi surplus atau defisit komoditas nasional dari waktu ke waktu.

Semua kegiatan tersebut merupakan dasar untuk merekomendasikan kebijakan, baik dalam bentuk perdagangan antar-pulau, penentuan kuota, maupun pengaturan pintu masuk impor. Tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah mengantisipasi potensi tekanan harga. ◆

Seni Kebijakan Moneter

John Maynard Keynes sempat khawatir kebijakan moneter bakal semakin mirip sains sehingga membosankan, bila aturannya sederhana dan meyakinkan. Namun, kebijakan moneter memang lebih mirip seni, seringkali subjektif tanpa ada patokan baku. Setiap negara, dalam situasi serupa pun dapat berbeda kebijakan moneternya.

Ketika harga properti dan indeks saham di Jepang meroket pada akhir 1980-an, Bank of Japan menunda menaikkan suku bunga acuan. Pertimbangannya, ketidakpastian pasar dunia setelah pasar modal dunia jatuh pada Oktober 1987 dan ekonomi Jepang masih dalam pemulihan dari resesi akibat apresiasi yen pada 1985-1986.

Pemangkasan suku bunga dari lima persen pada Januari 1986 menjadi 2,5 persen pada awal 1987 tak melemahkan yen terhadap dolar AS. Suku bunga rendah itu bertahan dua tahun, sampai akhirnya bank sentral Jepang sadar gelembung aset sudah terlalu besar dan lalu secara drastis menaikkan suku bunga sampai posisi enam persen dari akhir 1989 sampai pertengahan 1990.

Namun, pengetatan likuiditas sudah tak mampu mengempiskan gelembung aset yang akhirnya meletus pada 1991, menghapus nilai tabungan satu generasi. Sejak saat itu, perekonomian Jepang belum menggeliat meski suku bunga acuan berbalik hampir nol. Ekonom menyebutnya sebagai *zero lower bound*, terjebak suku bunga acuan terlalu rendah tapi tak menjadi stimulus ekonomi.

Amerika dan Eropa

Kebijakan suku bunga rendah juga dianut Amerika saat *booming* ekonomi pada paruh kedua dekade 1990-an. Namun, melihat membesarnya nilai saham berbagai perusahaan internet di bursa Nasdaq, Federal Reserve langsung menaikkan Fed fund rate dari 5,25 persen ke 6,5 persen, mulai Desember 1999 sampai akhir 2000. Hasilnya, gelembung "dot.com" langsung meletus tapi ekonomi Amerika hanya mengalami *soft landing* dan dampak krisis bisa dibatasi.

Ketika pada akhir 2001 ekonomi Amerika terdampak Serangan 9/11, Greenspan menurunkan suku bunga acuan secara drastis. Fed fund rate diturunkan dari posisi 5,5 persen pada Maret 2001 menjadi 1,75 persen di akhir tahun. Ketika ekonomi tak juga bergerak, suku bunga diturunkan lagi ke satu persen pada pertengahan 2003 dan bertahan setahun hingga ekonomi Amerika bergerak. Lalu, saat momentum ekonomi sudah digenggam, suku bunga acuan dinaikkan pelan-pelan, dari satu persen pada Juli 2004 menjadi 5,25 persen pada pertengahan 2006, lewat 17 kali kenaikan.

Amerika menghadapi ancaman inflasi ketika harga minyak dunia melambung. Ben Bernanke yang menggantikan Greenspan berniat mempertahankan suku bunga. Namun, krisis *subprime mortgage* pada 2007 yang menyebabkan likuiditas seret membuatnya menurunkan suku bunga mendekati 0,25 persen di akhir 2008, bertahan sampai sekarang.

> Setiap negara, dalam situasi serupa sekalipun, dapat menempuh kebijakan moneter yang berbeda.

Sementara Bank Sentral Eropa (ECB) kental diwarnai gaya Jerman dalam mengelola ekonomi, dengan "mantra" utama "kestabilan". Ketika ekonomi dunia lesu karena Serangan 9/11 di Amerika, ECB menurunkan suku bunga acuan secara gradual dari 4,5 persen pada pertengahan 2001 menjadi 3,25 persen di akhir tahun. Bertahan dua tahun, suku bunga diturunkan gradual mulai akhir 2002 sampai pertengahan 2003 ke posisi dua persen, sebagai stimulus lanjutan.

Pada 2005 ECB menolak menurunkan lagi suku bunga meski untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Harga minyak dunia yang tinggi, kelebihan pasokan likuiditas di pasar, dan lonjakan harga aset, menjadi alasan utama ECB mempertahankan suku bunga acuan dua persen selama dua tahun.

Anggota dewan gubernur ECB Nout Wellink menyatakan suku bunga tetap memang tak memberi kepastian, tapi dampaknya terbatas. Sedangkan penurunan suku bunga juga memberi ketidakpastian, namun berpotensi memberi dampak negatif lebih besar.

Thailand dan Malaysia

Beda lagi dengan dua negara tetangga, Thailand dan Malaysia. Kebijakan moneter kedua bank sentral sama-sama bertujuan mencapai tingkat inflasi rendah dan kestabilan nilai tukar. Namun Bank of Thailand menerapkan pengendalian inflasi, sementara Bank Negara Malaysia lebih fokus pada kestabilan nilai tukar untuk menjaga level inflasi.

Selama krisis ekonomi Asia 1997-1998, nilai tukar ringgit Malaysia sempat turun drastis dari 2,5 ringgit per dolar AS menjadi 4 ringgit per dolar AS. Nilai tukar baht Thailand juga jatuh dari 25 baht per dolar AS menjadi 40 baht per dolar AS, yang menaikkan inflasi. Untuk menstabilkan sistem keuangan, Malaysia menerapkan *overnight interest rate* sebagai *policy rate* sejak April 2004. Sedangkan Thailand sejak awal 2000 memilih memakai repo rate 14 hari.

Untuk menguras kelebihan likuiditas, Malaysia menggunakan instrumen *term deposit* berjangka waktu pekanan sampai bulanan, sementara Thailand memakai repo. Sejak 2004 Malaysia mengumumkan *stance* kebijakan moneternya tiap kuartal, sementara Thailand mengumumkannya setiap enam pekan sekali. Ini sejalan dengan lebih aktifnya Thailand mengubah suku bunga acuan dibandingkan Malaysia.

Suku bunga acuan Malaysia pernah ada di posisi 2,7 persen antara Februari 2004 sampai Agustus 2005, dengan sangat sedikit perubahan pada empat tahun sebelumnya. Sementara Thailand setelah menurunkan *policy rate*-nya sampai 1,25 persen di pertengahan 2003, mengetatkan likuiditas dengan menaikkan suku bunga acuan sampai lima persen pada 2006. Padahal, suku bunga acuan Thailand pernah dipatok lima persen pada pertengahan 2001.

Inilah Seni

Menghadapi krisis ekonomi global, hampir seluruh bank sentral G-20 termasuk The Fed, BOJ, ECB, dan People Bank of China menyetel suku bunga acuan ke titik rendah untuk menstimulus ekonomi yang lesu berkepanjangan.

Namun, suku bunga acuan hanyalah salah satu instrumen dari kebijakan moneter. The Fed, misalnya, juga membeli aset lembaga keuangan lewat dua skema *quantitative easing*. Sementara, ECB memilih memberi pinjaman likuiditas ke perbankan.

Laiknya seni, kebijakan moneter pun mengundang pujian dan kritik. Wartawan investigatif Bob Woodward memuji Greenspan, dengan menyebutnya tak hanya membawa bank sentral sebagai penjaga inflasi tapi juga berkontribusi pada kemakmuran Amerika. Namun, pengendoran likuiditas Greenspan juga dituding menyebabkan krisis ekonomi terbesar setelah Depresi Hebat 1930-1933. ◆

60 Tahun Bank Indonesia

Mempererat Koordinasi Wujudkan Visi

Dok BI

Susanto

ERNAWATI JATININGRUM
Departemen Komunikasi

Tema peringatan ulang tahun, sangat tepat, sesuai dengan visi yang ingin diwujudkan Bank Indonesia.

Momentum peringatan ulang tahun ke-60 Bank Indonesia, 1 Juli 2013, dimanfaatkan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo untuk berkumpul bersama seluruh jajaran bank sentral. Dimulai dengan ramah tamah dan dialog, kegiatan juga dipakai untuk mempertegas kembali berbagai kebijakan strategis Bank Indonesia ke depan.

Memanfaatkan momentum ulang tahun, Agus menyampaikan terima kasih kepada segenap pegawai Bank Indonesia, atas kontribusi mewujudkan angka inflasi di bawah 5 persen dalam dua tahun berturut-turut. Agus pun mengapresiasi pengawasan perbankan yang efektif, sistem pembayaran nasional dalam jumlah besar yang berjalan baik, dan terjaganya peredaran uang.

"Itu semua adalah prestasi yang telah kita jalani di 60 tahun kita berkiprah sebagai institusi negara dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Agus. Pidato Gubernur Bank Indonesia juga disimak para pegawai bank sentral di daerah melalui *video conference*.

Agus juga mengajak seluruh jajaran Bank Indonesia untuk senantiasa menjaga kewaspadaan menyikapi perkembangan ekonomi dunia. Bagaimanapun, situasi perekonomian global yang tidak stabil bisa mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

"Mari kita tetap bersiaga, waspada dan terus berkoordinasi secara baik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kita," tegas Agus. Kepada para pegawai Bank Indonesia yang bertugas di daerah, Agus pun meminta mereka terus menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk mempertahankan laju inflasi yang terkendali.

Ulang tahun ke-60 Bank Indonesia mengangkat tema "Menyatukan Langkah Mewujudkan BI sebagai Institusi yang Kredibel dan Terbaik di Regional". Menurut Agus, tema ini sangat tepat, sesuai visi yang ingin dicapai Bank Indonesia di tingkat regional, dengan menjunjung nilai strategis untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang stabil.

Keinginan menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional, menurut Agus, akan menuntun Bank Indonesia untuk senantiasa bekerja profesional dengan tata kelola (*governance*) yang baik. Karenanya, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghasilkan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat dan perekonomian nasional, tak boleh luput.

Sementara nilai-nilai strategis yang akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi Bank Indonesia, sebut Agus, adalah "*trust and integrity, professionalism, excellence, public interest, coordination and team work*". Harus terbangun, papar Agus, rasa saling percaya (*trust*) yang didukung dengan tata kelola dan integritas dari pribadi maupun lembaga yang baik (*integrity*), dengan kompetensi tinggi dan karakter yang

baik (*professionalism*), serta memberikan kinerja terbaik (*excellence*) untuk masyarakat dan *stakeholders* (*public interest*) melalui kerja sama dan kolaborasi internal dan eksternal (*coordination and team work*).

Adapun sebagai simbolisasi syukur atas 60 tahun usia Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia memotong tumpeng yang kemudian potongannya diserahkan kepada para Deputi Gubernur Bank Indonesia serta perwakilan termuda dari pejabat dan pegawai Bank Indonesia. Simbol berikutnya adalah pelepasan balon udara, mewakili harapan bakal tercapainya visi dalam komitmen yang tinggi, sekaligus menjaga kepercayaan yang tinggi dan mewujudkan karya terbaik untuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Difi A Johansyah, mengatakan hajatan ulang tahun Bank Indonesia tahun ini memang sengaja digelar sederhana di internal instansi. Bahkan, sebut dia, tak ada tamu khusus yang diundang untuk peringatan tersebut.

Tetap dengan mengedepankan kesederhanaan, serangkaian acara juga digelar untuk memperingati ulang tahun bank sentral ini. Antara lain, sebut Difi, berupa bazaar buku, pameran foto dan lukisan pegawai Bank Indonesia, donor darah, pagelaran wayang kulit di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Semarang, serta rangkaian kegiatan di museum Bank Indonesia yang ditutup dengan acara "Night at the Museum".

Selain itu, lanjut Difi, beragam kegiatan juga digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah, untuk memperingati ulang tahun ke-60 Bank Indonesia. Seperti, pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan promosi potensi daerah, seperti yang dilakukan di Ternate, sampai khitanan massal di Pontianak. ◆

Dok BI

MONETARIA

Kebijakan Moneter Seiring Waktu

1959-1965:

Inflasi tinggi, kebijakan moneter ketat menggunakan sistem pengendalian uang beredar (*monetary targeting* atau *base money targeting*). Kredit diawasi, terjadi devaluasi rupiah 74 persen, dari Rp 11,4 per 1 dolar AS menjadi Rp 45 per 1 dolar AS, sempat terjadi pembekuan deposito dan sanering.

1965:

Inflasi masih sangat tinggi mencapai 594 persen karena belanja pemerintah melonjak drastis dan menipisnya pasokan barang. Target kebijakan moneter adalah menstabilkan ekonomi, dengan pengendalian devisa dan valuta asing, ada sanering lagi.

1966-1969:

Era stabilisasi ekonomi, kebijakan moneter menggunakan pengendalian suku bunga (*interest rate targeting*) untuk meningkatkan pasokan likuiditas. Suku bunga pinjaman dan deposito dinaikkan, diterapkan giro wajib minimum 30 persen, pembatasan maksimal ekspansi perbankan, pelarangan pinjaman dan kredit impor jangka panjang untuk barang konsumsi.

1967-1983:

Era stabilisasi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi 6-7 persen yang diwarnai inflasi di bawah dua digit, kecuali di periode 1974-1978. Bauran kebijakan ekonomi mulai diterapkan, yaitu antara pengendalian suku bunga dan pengendalian uang beredar. Kredit dibatasi, ada pengaturan suku bunga. Berlaku sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*), dengan *multiple exchange rate system*).

1986-1987:

Kebijakan moneter mengarah pada pengendalian suku bunga (*interest rate targeting*).

1988-1990:

Deregulasi atau liberalisasi perbankan lewat Pakto 1988 untuk mengatasi inflasi melalui penguatan struktur perbankan. Kebijakan moneter mengarah pada pengendalian nilai tukar (*exchange rate targeting*).

1990-1997:

Ekspansi kredit bank terlampau besar dan tidak selektif membuat BI menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter masih mengarah pada pengendalian nilai tukar, menggunakan sistem nilai tukar mengambang yang lebih fleksibel. Bunga deposito pernah mencapai 27 persen, inflasi turun pada 1992.

1997-1998:

Krisis ekonomi, inflasi tinggi, nilai tukar rupiah anjlok. Kebijakan moneter diperketat lewat suku bunga sangat tinggi. Nilai tukar sempat dipantau ketat dengan penerapan *trading band* dan beragam intervensi, tapi lalu kembali ke nilai tukar mengambang. Kebijakan moneter masih mengarah ke pengendalian nilai tukar.

1999:

Kebijakan moneter BI adalah mencegah hiperinflasi sehingga ekspansi moneter harus dihentikan lebih dulu. Tujuan utama, stabilisasi nilai tukar rupiah yang juga akan berdampak pada pengendalian inflasi. Kebijakan pengendalian uang beredar mulai ditinggalkan, mulai mengarah ke pengendalian harga (*inflation targeting*) dengan BI rate sebagai instrumen utama. Pengambilan keputusan di BI menjadi lebih *forward looking*, melalui rapat dewan gubernur. Strategi komunikasi menjadi lebih transparan, koordinasi dengan pemerintah lebih diperkuat terutama untuk mengatasi inflasi dari *administered price* dan *volatile food*. BI rate menjadi batas atas suku bunga deposito.

Juli 2005:

Penerapan secara penuh kebijakan moneter dengan pengendalian harga (*inflation targeting framework* atau ITF). BI rate menjadi suku bunga acuan. ◆

Menyongsong Ramadhan dan Lebaran 2013

Didorong pula penggunaan uang elektronik.

Dian Rahayu

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fithri 1434 H pada 2013, Bank Indonesia kembali menyiapkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai, untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peningkatan kebutuhan selalu terjadi di kedua momentum.

Kenaikan kebutuhan pada 2013 diperkirakan lebih tinggi, karena bersamaan dengan turunnya gaji ke-13 bagi pegawai negeri, TNI, dan Polri, serta pencarian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Tahun ini, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai Rp 103,1 triliun untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Persiapan ini meningkat Rp 17,4 triliun dibandingkan realisasi momentum yang sama pada 2012.

Uang bernominal besar disiapkan sejumlah Rp 93,4 triliun, sementara uang bernominal kecil disiapkan Rp 9,7 triliun. Dari jumlah itu, Rp 102,9 triliun di antaranya adalah uang kertas, sementara Rp 156,263 miliar berupa uang logam.

> Uang elektronik dapat menjadi alternatif uang kertas dan uang logam, terutama untuk transaksi bernominal kecil.

Infrastruktur dan layanan sistem pembayaran non-tunai juga telah disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan transaksi pembayaran non-tunai, baik melalui jalur *real time gross settlement* (RTGS) maupun kliring. Rata-rata, kenaikan transaksi non-tunai setiap Ramadhan dan Idul Fithri adalah 14 persen dibandingkan transaksi normal harian.

Karenanya, per Mei 2013, Bank Indonesia menaikkan batas maksimum transfer dana melalui kliring, menjadi Rp 500 juta per transaksi. Peningkatan batas ini juga didukung sistem transfer dana *close to real time* "Si Kilat" (Sistem Kliring Kini Lebih Cepat). Harapannya, kliring diharapkan dapat menjadi alternatif bertransaksi secara cepat dan murah. Dalam menghadapi lonjakan transaksi RTGS dan Kliring, Bank Indonesia pun menggandeng perbankan, termasuk dengan menambah jam layanan operasional.

Mulai 15 Juli 2013, fasilitas transfer dana pun sudah semakin beragam. Hal ini seiring mulai dapat digunakannya transfer lintas operator dan perbankan. Sejak hari itu, nasabah perbankan dari jaringan ALTO, ATM Bersama, dan PRIMA, sudah dapat saling mentransfer dana seperti bila mengirimkan dana dengan sesama bank di jaringan yang sama.

Selain itu, per 15 Juli 2013 juga, telah diluncurkan layanan "P to P transfer". Layanan pengiriman dana dari orang ke orang tersebut memanfaatkan tiga operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan menggunakan layanan pesan singkat untuk bertransaksi.

Adapun penukaran uang bernominal besar ke nominal kecil, kembali dibuka pula oleh Bank Indonesia. Salah satu titik utama penukaran uang tersebut berlokasi di Monumen Nasional, yang dibuka mulai 10 Juli 2013 sampai 2 Agustus 2013. Penukaran di lokasi ini menggandeng 12 bank nasional.

Tahun ini, Bank Indonesia berupaya meningkatkan keamanan, dengan menerima kartu ATM atau kartu debet untuk ditukarkan isinya menjadi uang pecahan bernominal kecil. Selain di Monas, penukaran uang di Jakarta dilayani pula di 60 kantor bank, stasiun kereta api, dan pasar-pasar tradisional.

Selain di Jakarta, Kantor-kantor Perwakilan Bank Indonesia juga membuka layanan penukaran, menggandeng perbankan setempat. Seluruh layanan penukaran uang ini tidak dipungut biaya.

Untuk memadukan layanan pembayaran tunai dan non-tunai, khusus layanan di Monas, juga dibuka layanan penukaran uang elektronik tanpa biaya. Tujuan layanan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran berbasis kartu seperti uang elektronik, untuk keamanan dan kenyamanan transaksi. Uang elektronik dapat menjadi alternatif uang kertas dan uang logam, terutama untuk transaksi bernominal kecil. ◆

Pegawai Baru

Budi baru dinyatakan diterima menjadi pegawai baru di sebuah perusahaan. Setelah menandatangani kontrak kerja, dia baru ingat untuk bertanya ke manajernya soal fasilitas yang akan dia dapatkan.

Budi : Pak, di sini dapat asuransi kesehatan?
Manajer : Iya, dapat. Tapi preminya dipotong dari gaji pegawai.
Budi : Oh, di perusahaan saya dulu, semua jadi tanggungan perusahaan..
Manajer : O, ya? Bagaimana dengan asuransi jiwa?
Budi : Ditanggung perusahaan juga, Pak.
Manajer : Ada fasilitas apa lagi di perusahaanmu dulu?
Budi : Kami bisa mengajuka izin sakit tak ter batas, cuti sampai tiga pekan, bonus dua kali *take home pay* di akhir tahun, tunjangan hari raya tiga kali *take home pay*, dan uang makan sesuai kenyataan harga di warung.
Manajer : Wah, hebat sekali perusahaanmu dulu. Kenapa kamu keluar dari perusahaan itu?
Budi : Iya, Pak. Sayang sekali, terpaksa. Perusahaan itu kemarin bankrut sih Pak. ◆

Diam Lebih Mahal

Di sebuah toko yang menjual burung, ada dua ekor burung kakaktua. Satu burung sangat pintar menyanyi beragam siulan berlagu. Sementara satu ekor yang lain, sepanjang waktu hanya berdiam.

Suatu hari, datanglah calon pembeli ke toko itu. Berikut percakapan calon pembeli (B) dan pemilik toko (J).

B : Berapa harga burung-burung ini?
J : Kalau yang pintar menyanyi, Rp 1 juta. Lalu yang hanya diam itu Rp 2 juta.
B : *Lho*, *kok* yang diam terus malah lebih mahal?
J : Jelas dia yang diam itu lebih mahal. Dia *kan* yang menciptakan lagu yang dinyanyikan yang satunya. ◆

Ujian Susulan

Ada empat mahasiswa telat ikut ujian semester karena bangun kesiangan. Keempat mahasiswa ini lalu kompak menyusun strategi membuat alasan yang sama, untuk merayu dosen memberikan ujian susulan.

Maklum, mata kuliah ini adalah syarat untuk bisa mata kuliah di semester berikutnya. Bila tak lulus ujian mata kuliah ini, mereka pun baru bisa mengulang tahun depan, alias akan ketinggalan mata kuliah di semester berikutnya pula.

Mahasiswa 1: Bu, maaf kami telat ikut ujian semester
Mahasiswa 2: Iya, bu. Kami berempat naik metromini yang sama. Metromini yang kami tumpangi, pecah ban, bu.
Mahasiswa 3: Karena *nunggu* metromini lain juga lama, kami akhirnya bantuin sopir metromini itu mengganti ban. Sama-sama telat juga akhirnya, menunggu atau bantuin sopir itu, bu.
Mahasiswa 4: Apakah kami boleh meminta kebaikan hati Ibu untuk bisa memberikan kami ujian susulan?

Setelah berpikir sejenak, Ibu dosen pun membolehkan keempat mahasiswa itu mengikuti ujian susulan. Tapi, mereka tak boleh ujian di satu ruangan. Selain itu, soal ujian kedua hanya boleh dijawab setelah soal pertama dijawab, begitu juga soal ketiga baru boleh dijawab setelah soal kedua dijawab, dan seterusnya. Ibu dosen itu bilang ada 10 soal ujian, dengan masing-masing soal berbobot 10.

Ujian pun berlangsung. Keempat mahasiswa ini berpikir, beda ruangan hanya untuk mencegah mereka mencontek. Soal pertama mereka jawab dengan penuh senyum, karena memang mudah. Tapi, senyum mereka langsung pupus sesudahnya, begitu melihat soal kedua.

Apakah bunyi soal nomor dua itu?

Di lembar soal, tertulis: Dari metromini yang kalian tumpangi tadi pagi, ban yang manakah yang pecah? ◆

BI Rate vs DF Rate?

Otoritas moneter harus berperan membuat pasar lebih efisien, karena di situlah sejatinya lokasi "pertempuran" pengelolaan likuiditas sebagai implementasi kebijakan moneter.

Bila dulu pertanyaan yang sering muncul adalah apa beda BI rate dengan SBI rate, sekarang adalah apa beda BI rate dengan DF rate. Selain definisi, pertanyaannya juga adalah mana yang menjadi sinyal kebijakan Bank Indonesia.

Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) mulai diterapkan pada 2005. Tantangan komunikasi saat itu adalah menjelaskan "barang abstrak" ini kepada pasar yang sebelumnya lebih akrab dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dalam pemahaman publik saat itu, seolah-olah, BI rate adalah suku bunga untuk SBI. Padahal, SBI merupakan salah satu alat operasi moneter saja.

Setelah masyarakat, terutama pelaku pasar paham apa itu BI rate dan SBI, sekarang muncul "pemahaman" baru. Dalam praktik, BI rate hanya dilihat sebagai acuan suku bunga jangka panjang untuk pencapaian target inflasi. Sementara di pasar keuangan, suku bunga yang dianggap sebagai sinyal kebijakan Bank Indonesia justru adalah Deposit Facility (DF) rate.

Susanto

FITRIA IRMI TRISWATI
Departeman Pengelolaan Moneter

Ekses Likuiditas

Pemaknaan atas DF rate tersebut bemula dari fakta kelebihan likuiditas yang permanen dan struktural di pasar uang. Berhadapan dengan ekses likuiditas, Bank Indonesia mengambil beberapa strategi operasi moneter.

Salah satu strategi itu adalah memberi toleransi terhadap pergerakan suku bunga yang menempel pada koridor bawah suku bunga, diterapkan mulai Oktober 2010 seiring banjir arus masuk modal asing (*capital inflow*). Argumentasinya, pergerakan pasar uang antarbank *overnight* (PUAB O/N) dalam koridor suku bunga masih relevan dengan pencapaian rentang target inflasi.

Saat ini, PUAB O/N ditransaksikan pada tingkat suku bunga sekitar 4,85 persen, tidak jauh dari DF rate yang dipatok 4,75 persen. Kelebihan likuiditas menyebabkan bank cenderung memegang horison waktu pendek dalam penempatan dana. Karenanya, DF rate menjadi acuan harian untuk bertransaksi di PUAB.

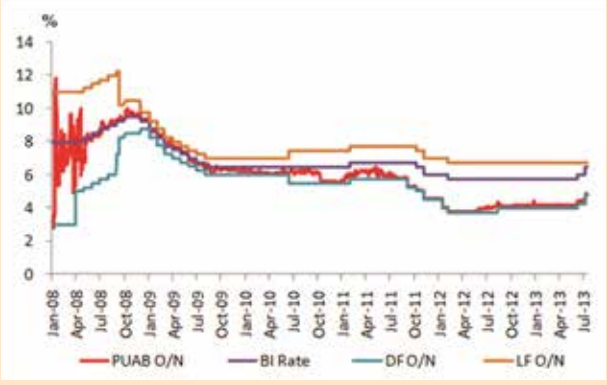

Lalu, apa posisi BI rate? Suku bunga PUAB O/N tak lagi merefleksikan BI rate yang sekarang bertengger di level 6,5 persen. Padahal BI rate adalah suku bunga yang diinginkan Bank Indonesia sebagai rujukan di pasar. Perubahan DF pun dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar yang diyakini sangat dipengaruhi oleh *capital inflow* yang sangat sensitif terhadap suku bunga pasar, merujuk ke DF rate.

Perubahan praktik rujukan ini menempatkan BI rate sebagai suku bunga acuan, yang fungsinya lebih difokuskan untuk keperluan jangka panjang terkait pencapaian target inflasi. BI rate adalah respons kebijakan, yang besarannya dipertimbangkan berdasarkan pengujian terhadap seluruh indikator makroekonomi, dengan memperhatikan efektivitas transmisi kebijakan dan ekspektasi inflasi.

Bukan Soal Lebih Ampuh

Dalam kerangka operasional berbasis suku bunga pada *Inflation Targeting Framework* (ITF), penyempurnaan kerangka kerja adalah kebijakan yang dinamis dan adaptif. Penyempurnaan meliputi penguatan strategi operasi moneter yang terintegrasi di pasar uang rupiah dan valas, sekaligus mendukung pendalaman pasar uang dan manajemen ekses likuiditas.

Karenanya, tidak masalah suku bunga mana yang dipilih atau yang dianggap lebih ampuh berperan sebagai suku bunga acuan. Keyakinan bahwa suku bunga tersebut signifikan berperan dalam transmisi kebijakan moneter, dan akhirnya dalam pencapaian target inflasi yang menjadi amanat BI, adalah yang paling penting. Suku bunga itu harus jelas pula hubungannya dengan sasaran operasional pelaksanaan operasi moneter dalam manajemen likuiditas harian.

Suku bunga acuan yang dipakai juga harus berlandaskan keyakinan terhadap pengelolaan ekses likuiditas yang tepat dalam *blue print* strategi operasi moneter. Pengujian risiko kelebihan likuiditas, termasuk risiko toleransi suku bunga rendah terhadap pencapaian target inflasi, perlu diafirmasi untuk mendukung cetak biru itu.

Blue print strategi operasi moneter tentunya juga harus terintegrasi dengan *blue print* pendalaman pasar uang. Otoritas moneter harus berperan membuat pasar lebih efisien, karena di situlah sejatinya lokasi "pertempuran" pengelolaan likuiditas sebagai implementasi kebijakan moneter. ◆

Menakar "Obat" Moneter

Makin terbukanya perekonomian Indonesia dan terus tumbuhnya ekonomi domestik, menyebabkan kompleksitas permasalahan perekonomian pun semakin banyak.

Saat kita kecil, banyak penyakit "khas" anak kecil cukup diatasi dengan satu jenis obat, dan itu pun sudah terasa sangat berat bagi kita untuk meminumnya. Sementara seiring waktu tubuh kita semakin rentan terserang penyakit karena ekspose lingkungan atau makanan, dan satu obat tak lagi selalu cukup untuk mengobati satu penyakit.

Kondisi serupa, terjadi ketika kita bicara soal kebijakan moneter Bank Indonesia. Banyak kalangan hanya mengaitkan kebijakan moneter itu dengan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, laiknya satu jenis obat generik untuk segala jenis "penyakit" perekonomian. Masyarakat pun menganggap Bank Indonesia identik dengan kebijakan suku bunga acuan tersebut.

Apalagi di satu masa kebijakan BI rate memang pernah berperan besar menyelamatkan ekonomi Indonesia. Pada 2005 dan 2008, ketika terjadi tekanan inflasi dan nilai tukar, Bank Indonesia menaikkan BI rate masing-masing 425 basis poin dan 150 poin. Hasilnya, deraan inflasi tinggi pada saat itu berangsur turun. Langkah tersebut membawa perekonomian Indonesia stabil dalam beberapa tahun terakhir. Boleh dibilang, BI rate telah menjadi "obat" untuk "sakit" inflasi pada waktu itu.

Namun tak beda dengan manusia, seiring waktu perekonomian Indonesia pun semakin rentan berhadapan dengan beragam "penyakit". Makin terbukanya perekonomian Indonesia dan terus tumbuhnya ekonomi domestik, menyebabkan kompleksitas permasalahan perekonomian pun semakin banyak.

Bauran Kebijakan

Efektivitas BI rate sebagai "obat" persoalan ekonomi, juga tergantung pada transmisi moneter yang sangat mengandalkan fungsi dan efisiensi sektor keuangan. Kalau sektor keuangan belum berkembang atau belum dalam, seperti kondisi di Indonesia saat ini, dibutuhkan pula kebijakan moneter lain. BI rate yang didukung dengan beragam kebijakan moneter lain inilah, yang kerap kita sebut dengan dengan istilah "Bauran Kebijakan Bank Indonesia".

Susanto

ERWINDO KOLOPAKING
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

> Obat akan efektif bila diberikan sesuai diagnosa penyakit. Termasuk "obat" BI rate untuk "penyakit" di perekonomian Indonesia.

Pada Juni 2010, bauran kebijakan tersebut muncul sebagai "Paket Kebijakan Bank Indonesia 16 Juni 2010". Tujuan penerbitan paket kebijakan ini adalah mendorong pasar keuangan, yaitu dengan menyediakan instrumen pasar yang lebih beragam, sekaligus mendorong perbankan untuk lebih banyak bertransaksi di pasar sekunder.

Pada saat bersamaan, paket itu pun mendorong profil jatuh tempo transaksi perbankan dengan Bank Indonesia diutamakan ke tenor yang lebih panjang. Tujuannya, menyerap kelebihan likuiditas yang tidak diperlukan. Rangkaian kebijakan tersebut membuat efektivitas kebijakan moneter meningkat. Kesinambungan stabilitas makro juga terjaga. Sementara momentum pemulihan ekonomi pun semakin kuat.

Sesudah terbitnya paket pada Juni 2010 itu, hampir setiap rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tak hanya mengumumkan BI rate. Hampir selalu diumumkan pula paket kebijakan atau bauran kebijakan yang lebih spesifik di sektor tertentu atau yang lebih bersifat mikro.

Misalnya, diumumkan juga kebijakan penyesuaian giro wajib minimum (GWM), 6 *months holding period*, serta kebijakan menjaga nilai tukar sesuai fundamentalnya melalui intervensi dan transaksi *swap*. Juga, penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah terkait inflasi, serta kebijakan lain yang diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Kebijakan BI rate sejak September 2011 memperlihatkan tren penurunan, bahkan bergeming di level yang sama sejak Februari 2012 hingga Mei 2013. Namun, bauran kebijakan mampu menjaga stabilitas perekonomian, nilai tukar, dan sistem keuangan dari pengaruh global maupun internal, termasuk dari terpaan inflasi dan perlambatan ekonomi.

Selama 3 tahun berturut-turut perekonomian Indonesia tumbuh dengan rata-rata 6,2 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi negara kawasan yang tumbuh rata-rata 5,1 persen. Sementara nilai tukar bergerak sesuai fundamental pada kisaran Rp 8.500 sampai Rp 9.800 per dolar Amerika Serikat. Sejak 2010, realisasi inflasi juga selalu berada di bawah target yang dipatok.

Laiknya obat pada manusia, satu jenis obat sekalipun berdosis tinggi, belum tentu efektif mengobati penyakit, apalagi bila tak sesuai dengan jenis penyakitnya. Obat akan efektif bila diberikan sesuai diagnosa penyakit. Termasuk "obat" BI rate untuk "penyakit" di perekonomian Indonesia. ◆

Kolaborasi di *Cash in Transit*

Pada 7 Juli 2013, Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia membuat nota kesepahaman tentang koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengolahan uang rupiah. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Oegreseno.

Dok BI

Selama ini, badan usaha jasa pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang hanya menyediakan jasa sebagai kurir angkut uang dan barang berharga, terutama untuk perbankan. Seiring inovasi dan perkembangan bisnis perbankan, badan usaha yang kerap pula disebut sebagai Cash in Transit (CiT) ini juga melayani jasa penghitungan, penyortiran, dan pengemasan uang, penyimpanan uang, serta pengisian ATM/CDM (ATM *replenishment*).

Dalam kerangka aspek perlindungan nasabah, Bank Indonesia mewajibkan semua bank dan atau perusahaan jasa pengolahan uang memastikan uang yang mereka edarkan ulang terbebas dari uang palsu, dan kondisinya layak edar sesuai standar Bank Indonesia. Dengan nota kesepakatan ini, Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap CiT pada aspek pengolahan uang rupiah.

Sementara kepolisian, berdasarkan kesepakatan ini akan fokus pada pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan CiT berupa audit, asesmen, dan pengawasan. Juga, menerbitkan surat rekomendasi untuk mendapatkan izin operasional, memberikan sanksi, serta membekukan atau membatalkan izin operasional CiT.

Harapannya, kualitas layanan perusahaan CiT dapat lebih terstandardisasi dan meningkat, untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Selain itu diharapkan pula keamanan kegiatan jasa kawal angkut uang dapat lebih meningkat, demikian juga risiko nasabah akibat uang tak layak atau uang palsu dapat ditekan.

Sebelumnya, Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan Polri, dalam hal penanganan tindak pidana perbankan serta sosialisasi dan penindakan peredaran uang palsu. ◆

Arek Surabaya Resik Teka Narkoba!

Dok BI

Bertempat di pelataran Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur di Jalan Darmo, sekumpulan anak muda tampil menyajikan permainan musik akustik. Selain menjadi wadah kreasi, masyarakat juga didekatkan pada perpustakaan.

Kegiatan tersebut merupakan inisiasi dan kerja sama Bank Indonesia Surabaya dengan RSUD Dr Soetomo serta komunitas warga Surabaya seperti Kelompok Metal Seduluran. Ini adalah salah satu upaya mendukung gerakan "Arek Surabaya Resik Teka Narkoba", alias "Warga Surabaya Bersih dari Narkoba".

Pilihan kegiatan ini juga merupakan bagian kepedulian Bank Indonesia Surabaya pada generasi muda. Sebagai bank sentral, upaya menjaga kestabilan ekonomi akan sangat terkait pada kualitas sumber daya manusia. Tanpa sumber daya manusia yang sehat, baik jasmani ataupun rohani, pembangunan ekonomi yang berkualitas akan sulit diwujudkan. Karenanya, kegiatan yang membentuk karakter anak muda, perlu didukung oleh berbagai lembaga dan instansi di negeri ini.

Kegiatan musik akustik sengaja digelar di depan gedung perpustakaan pun punya tujuan lain. Masyarakat Surabaya didekatkan pada perpustakaan Bank Indonesia untuk membangkitkan minat baca. "Daripada anak-anak muda terjerumus ke narkoba lebih baik 'terjerumus' pada buku-buku bacaan," kata Kepala Divisi Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur, Junanto Herdiawan.

Rencananya, penampilan musik akustik ini akan terus digelar setiap bulan hingga November 2013. Selain itu, anak-anak muda Surabaya juga mendapat kesempatan untuk unjuk kreasi, seperti *modern dance* dan pantomim. ◆

Dari Yogyakarta untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dok BI

Dalam rangka menyebarluaskan semangat berwirausaha kepada masyarakat, terutama kaum muda, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Pameran Wirausaha Baru dan UMKM binaan di Kantor Bank Indonesia Yogyakarta. Tema yang diangkat adalah "Kreatifitas Jogja Menyongsong ASEAN *Economic Community* 2015".

Lebih dari 40 pelaku usaha turut dalam kegiatan pameran. Mereka berasal dari 20 pemenang kompetisi Wirausaha Baru Bank Indonesia DIY, UMKM Binaan, serta perwakilan wirausahawan baru binaan dari Makassar, Bali, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

Beragam produk kreatif, unik dan menarik ditampilkan oleh para wirausahawan muda ini. Mulai dari kerajinan batik, tas, pernak-pernik ramah lingkungan, pertanian, robot dan produk elektronik, budidaya cacing, makanan olahan, ternak, hingga produk kuliner.

Bersama seluruh stan tersebut, digelar pula klinik perbankan. Melalui klinik ini, para peserta dan pengunjung pameran dapat berkonsultasi tentang produk perbankan. Klinik ini juga merupakan bagian program f*inancial inclusion*.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan keterpaduan program dan adanya pendampingan menjadi kunci sukses melahirkan kemandirian berusaha dari sektor UMKM. Kesimpulan itu, ujar dia, berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM.

Bank Indonesia pun menyerukan kepada para wirausahawan muda untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada kalangan muda lain di sekitarnya. Sesudahnya, para wirausahawan ini diminta untuk bersama-sama berkembang dan berkompetisi dengan produk lain, termasuk dari negara-negara di kawasan ASEAN.

Selain bertujuan memperkenalkan dan memasarkan produk dari para wirausahawan, pameran juga memberikan kesempatan pada kalangan muda di Yogyakarta berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha itu. Harapannya, wawasan kewirausahaan akan terbuka, sekaligus membawa pola pikir mereka untuk tertarik berwirausaha.

Melengkapi kegiatan, dilakukan pula *talkshow* kewirausahaan, bertajuk "Dari Jogja untuk Indonesia, Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015". Digelar juga bedah buku "Lupa Endonesia" oleh Sujiwo Tejo dan Butet Kertarajasa, serta beragam lomba dan sosialisasi keuangan maupun perbankan termasuk soal memeriksa keaslian uang. ◆

Dok BI

Empati pada Saudara..

Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Bener Meriah, Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, pada Selasa (2/7/2013) siang. Puluhan orang terdata menjadi korban tewas, dengan ratusan yang lain terluka dan ribuan yang lain harus mengungsi.

Untuk meringankan beban para korban bencana alam di daerah penghasil kopi ini, Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe mengirimkan bantuan logistik. Bantuan berupa makanan dan pakaian pantas pakai. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Ahmad Farid, langsung mengantarkan bantuan ke daerah tersebut.

Berikut adalah foto-foto yang diambil dari lokasi bencana alam tersebut:

Dok BI

Tak Cukup HANYA Suku Bunga

Susanto

Kebijakan moneter oleh bank sentral mempunyai tujuan agar pergerakan inflasi ke depan tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Namun, kebijakan moneter untuk stabilisasi harga (*inflation targeting framework*) yang hanya bertumpu pada kebijakan suku bunga tidak selalu efektif dan efisien.

Inflasi tak hanya dipengaruhi faktor moneter, namun juga faktor nonmoneter seperti gangguan produksi atau distribusi pangan serta harga barang yang ditetapkan pemerintah (*administered prices*). Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengingatkan bahwa pencapaian target inflasi yang ambisius juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Apalagi sektor keuangan juga tidak selalu bekerja efisien, karena berbagai sebab seperti aksi berisiko pelaku pasar serta *moral hazard*, pengaruh modal asing jangka pendek dan spekulatif, serta perilaku prosiklisitas kredit perbankan. Kebijakan suku bunga pun tidak bisa dipergunakan sebagai instrumen yang bersifat alokatif dan distributif terhadap sektor atau segmen ekonomi tertentu yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja.

> Bila hanya mengandalkan instrumen suku bunga, hasilnya tak akan efektif dan biayanya mahal.

Bila hanya mengandalkan instrumen suku bunga untuk menghadapi berbagai permasalahan ekonomi ––inflasi yang tinggi, nilai tukar yang fluktuatif, kredit yang melaju terlalu cepat, atau neraca pembayaran yang terus defisit–– maka dipastikan hasilnya tak akan efektif dan biayanya mahal. "Di samping dampaknya terhadap *output* yang lebih restriktif, ketidaksempurnaan pasar keuangan menyebabkan transmisi suku bunga tidak selalu efektif berpengaruh pada perekonomian," kata Perry.

Karena itu, dibutuhkan pendekatan baru berupa penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. Lima instrumen kebijakan dioptimalkan, yaitu terkait suku bunga, nilai tukar, pengendalian arus modal asing, kebijakan makroprudensial terhadap sektor keuangan, dan komunikasi kebijakan.

Tujuan utama dari bauran kebijakan ini adalah tercapainya stabilitas moneter. Yakni, kondisi ketika saluran-saluran transmisi kebijakan moneter seperti suku bunga, nilai tukar, likuiditas (uang beredar), kredit, dan ekspektasi inflasi berfungsi dengan baik dalam pencapaian kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Esensinya adalah instrumen kebijakan berdasar mekanisme pasar, didukung oleh instrumen kebijakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar keuangan. Penerapan pendekatan ini di Indonesia setidaknya sejak 2010 terbukti lebih efektif dan efisien bagi perekonomian. Kinerja moneter yang baik mampu mendukung ketahanan perekonomian nasional dari dampak krisis global. Namun, tetap dibutuhkan pula beragam penguatan, termasuk pengembangan dunia akademis dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ◆